



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN PENETAPAN STANDAR BIAYA LAINNYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas, dan standar biaya lain-lain;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Standar Biaya Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan

Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah di ubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENETAPAN STANDAR BIAYA LAINNYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Tengah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah;
8. Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Yang tidak menduduki jabatan struktural;
9. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat dilingkungan Pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri;
10. Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;

11. Pihak Lain adalah orang/pejabat selain yang diatur pada angka 3 sampai dengan angka 8 yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
12. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
18. Perjalanan Dinas Dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk kepentingan daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang;
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah daerah Kabupaten Halmahera Tengah untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang;
20. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas Perintah Pejabat yang berwenang;
21. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
22. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
23. *At Cost* adalah biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah;

24. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil daerah dan Pegawai Tidak Tetap Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas;
26. Wilayah jabatan atau tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas atau tempat/kota/kantor/satuan kerja berada;
27. Tempat Tujuan adalah tempat/ kota/ kantor/ satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
28. Biaya Perjalanan Dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil daerah, dan Pegawai Tidak Tetap daerah sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas;
29. Dokumen Pelaksanaan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
31. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
32. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
33. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke kas daerah sebelum pelaporan SPP-GU bulan berikutnya;
34. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati;

35. Kelebihan Pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan;
36. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
37. Biaya Transportasi Lokal adalah biaya transportasi dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan sebaliknya sert.

B A B II

PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALAN DINAS

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dibuktikan dengan persetujuan/nota dinas atasan langsung atau dapat dibuktikan dengan terbitnya SPPD Pejabat Negara, anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 3

Dalam penerbitan Surat Tugas dan SPPD harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bupati karena jabatannya dapat menerbitkan Surat Tugas dan SPPD untuk dirinya sendiri dan wakil Bupati dalam rangka melakukan perjalanan dinas
2. Wakil Bupati dapat menerbitkan Surat Tugas dan SPPD untuk dirinya sendiri dalam rangka melakukan perjalanan Dinas apabila Bupati tidak berada ditempat.
3. Penugasan untuk Pimpinan DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD untuk dirinya sendiri, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
4. Penugasan untuk anggota DPRD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD, sedangkan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
5. Untuk Sekertaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Camat ditandatangani oleh Pejabat satu tingkat di atasnya.
6. Untuk Pegawai Negeri Sipil baik Eselon II/b. dilingkungan Sekretariat Daerah, Eselon III, Eselon IV, Staf Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan SKPD serta pihak lain yang dipandang perlu dalam rangka

- melaksanakan urusan pemerintahan, SPPD ditandatangani Bupati, atau Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah, atau para Asisten.
7. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh PNS yang bertugas di kecamatan dalam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- untuk perjalanan dinas dalam daerah, surat penugasan dan SPPD ditandatangani oleh Camat dan/atau Kepala SKPD, atau Kepala UPTD setelah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran dari UPTD yang bersangkutan;
 - untuk perjalanan dinas luar daerah berlaku ketentuan pasal 3 angka 6 (enam)

B A B III

KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ke kedudukan semula dalam rangkaian tugas kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah terdiri dari:
 - a. Uang harian yang meliputi, biaya makan dan uang saku;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya tiket pesawat;
 - d. Biaya transportasi lokal;
 - e. Biaya taxi
 - f. Biaya representasi;
 - g. Biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan;
 - h. Biaya Transport dalam kota tujuan.
- (2) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada Pejabat Negara.

- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan yang dipersyaratkan dan fasilitas yang ditanggungkan di dalam biaya kontribusi oleh pelaksana kegiatan.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 6 (enam) tingkat yaitu:
- a. Tingkat A terdiri Bupati, Wakil Bupati;
 - b. Tingkat B terdiri dari Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, dan Staf Ahli;
 - c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Golongan IV Non Eselon;
 - e. Tingkat E terdiri dari Pegawai Non Eselon; dan
 - f. Tingkat F terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap (PTT/Honorer/PPPK).
- (6) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf g dan huruf h dibayarkan secara *at cost* atau sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran SKPD.

Pasal 8

Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri dari:
 - a. Uang harian yang meliputi, biaya makan dan uang saku;
 - b. Biaya transport
 - c. Biaya representasi;
 - d. Biaya penunjang perjalanan dinas
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diperuntukan bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diperuntukan bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD;
- (5) Terhadap anggota DPRD, biaya sebagaimana dimaksud pasal (9) huruf e diperuntukan untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja reguler dan kunjungan kerja reses
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan biaya transportasi setempat.
- (7) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Untuk perjalanan dinas luar daerah diperhitungkan dengan ketentuan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah melaksanakan kegiatan atau berdasarkan tanggal yang terdapat pada tiket pergi dan tiket pulang sesuai dengan SPPD yang diterbitkan atau berdasarkan kebutuhan nyata perjalanan dinas yang dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Uang harian perjalanan dinas diberikan sesuai hari yang ditentukan dalam SPPD yang merupakan batas tertinggi uang harian atau sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
- (2) Dalam hal terdapat biaya kontribusi untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang membebaskan termasuk untuk biaya penginapan pada bimtek/kursus dilaksanakan, maka biaya penginapan dan uang harian yang dibayarkan hanya perlu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaan kegiatan atau melihat kesesuaian antara tanggal tiket berangkat

dengan tanggal bimtek/kursus dilaksanakan sesuai dengan tingkatan melaksanakan perjalanan dinas.

- (3) Untuk kegiatan yang **tidak** menyediakan biaya transportasi, uang harian dan biaya penginapan oleh pihak yang mengundang, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (4) Untuk kegiatan yang menyediakan biaya transportasi dan/atau uang harian dan/atau biaya penginapan, maka kepada pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas hanya diberikan biaya sesuai pasal 5 ayat (1) yang tidak ditanggung oleh pihak yang mengundang.

Pasal 12

- (1) Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas, dapat menggunakan biaya penginapan melebihi klasifikasi dan tingkatan biaya yang ditetapkan, jika ruang/kamar penginapan menggabungkan lebih dari satu orang.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan akumulasi biaya dari rill masing-masing PNS/Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dan tidak boleh melebihi penetapan batas tertinggi biaya hotel/penginapan.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di daerah tujuan sesuai dengan tingkatan biaya penginapan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Pasal 13

- (1) Ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang melaksanakan tugas perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Ajudan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur anggota TNI dan PORLI, biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf e.

Pasal 14

- (1) Selain Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal yang sangat mendesak/ khusus, dengan mempertimbangkan hubungan antara perjalanan dinas tersebut dengan kepentingan Pemerintah Daerah dan setelah memperoleh persetujuan Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas juga dapat diberikan kepada Pejabat dari Instansi Vertikal, Ketua Tim Penggerak PKK, Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau diundang/ dipanggil khusus oleh Pemerintah Daerah dan biaya perjalanan dinas digolongkan menurut tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf b.

Pasal 15

- (1) Dalam hal perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas konsultasi dan koordinasi dapat diberikan perjalanan paling lama 5 (lima) hari.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 16

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan:

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum dan sesudah perjalanan dinas dilaksanakan dengan menggunakan uang persediaan yang terdapat pada kas bendahara pengeluaran atau melalui Pembayaran Langsung.
- (2) Untuk perjalanan dinas yang dibayarkan setelah pelaksanaan kegiatan/perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan bendahara pengeluaran bersamaan dengan dokumen pertanggungjawaban disampaikan setelah perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 18

- (1). Jumlah hari yang menjadi dasar perhitungan Biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan waktu yang ditetapkan dalam SPPD atau berdasarkan hasil pengeluaran riil.
- (2). Khusus untuk biaya penginapan, ditanggung selama hari perjalanan dinas berdasarkan bukti pendukung dan biaya riil yang dilampirkan dengan memperhatikan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 19

Pemberian biaya perjalanan dinas didasarkan pada permintaan Pengguna Anggaran/ kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran pembantu dengan dilampiri :

- (1). Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2). Daftar Penetapan biaya perjalanan dinas beserta rincian biaya perjalanan dinas.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 20

- (1). Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2). Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD berkenaan atau ditentukan lain.

Pasal 21

- (1). SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2). Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.

- (3). Jika ada perubahan-perubahan yang dilakukan dengan coretan untuk dapat dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4). Pada SPPD dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan di cap;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/ pejabat ditempat yang didatangi dan di cap;
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (5). SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang diserahkan kepada bendahara, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban belanja SPPD.
- (6). Kelebihan atas uang muka perjalanan dinas wajib dikembalikan kepada bendahara.
- (7). Perhitungan sisa lebih/kurang biaya didalam pelaksanaan perjalanan dinas, dibuat dalam rincian yang menunjukkan uang muka yang diterima dari bendahara pengeluaran, biaya-biaya yang dikeluarkan serta selisih lebih yang harus dikembalikan atau selisih kurang yang dapat ditambahkan bendahara pengeluaran.

Pasal 22

- (1). Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu :
 - a. Surat undangan/ surat permintaan/ surat panggilan atau surat lainnya sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan/ atau telahan yang disetujui atau perintah khusus dari Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;
 - b. SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Bukti pembayaran riil yang dikeluarkan sesuai komponen *at cost* yang diatur dalam pasal 6 ayat (2)
 - d. Daftar pembayaran ril dari komponen *lumpsum* sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1)
 - e. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal 23

- (1). Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu :
 - a. Surat undangan/ surat permintaan/ surat panggilan atau surat lainnya sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah dan/atau telaahan yang disetujui atau perintah khusus dari Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk;
 - b. SPPD yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas yang relevan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh Pejabat/ Pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

Pasal 24

- (1). Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini didalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2). Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Pasal 25

- (1). Pejabat yang berwenang dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2). Terhadap kesalahan dan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku;

Pasal 26

Pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan ditentukan hingga pada pembuktian, bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

Perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dituangkan dalam perincian biaya perjalanan dinas terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Perjalanan Dinas Luar Negeri didasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Format rincian biaya perjalanan dinas dan perhitungan Surat Perjalanan Dinas (SPD) rampung, SPPD Dalam daerah dan Luar Daerah, terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII STANDARSATUAN BIAYA LAIN-LAIN

Pasal 30

Standar Satuan Biaya Lain Lain adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang berfungsi sebagai batas tertinggi atau estimasi.

Pasal 31

Biaya lain-lain dapat dianggarkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan tetap memperhatikan urgensi, rasionalitas, dan efesiensi penggunaan keuangan daerah

Pasal 32

Standar Satuan Biaya Lain-lain sebagaimana dimaksud pasal 30 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1). PPKD selaku BUD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2). Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Standar Biaya Lainnya Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatan dalam berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah

Ditetapkan di Weda
Pada Tanggal, 3 April 2017


BUPATI HALMAHERA TENGAH, 
M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada Tanggal 10 April 2017


SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH, 
BASRI AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 281

Penjelasan
Atas
Peraturan Bupati Halmahera Tengah
Nomor 10 Tahun 2017
TENTANG
PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DAN PENETAPAN STANDAR BIAYA LAINNYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai perjalanan dinas, dan standar biaya lain-lain. Pengaturan dan penetapan kembali standar biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

The official stamp of the Bupati Halmahera Tengah is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a crescent moon and a smaller star to its right. The word "BUPATI" is written in a semi-circle above the star, and "HALMAHERA TENGAH" is written in a semi-circle below it. The entire emblem is surrounded by a decorative border.
BUPATI HALMAHERA TENGAH,
M. AL YASIN ALI

PENJELASAN

LAMPIRAN I

HALMAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENETAPAN STANDAR
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

a. Transportasi Perjalan Dinas Dalam Daerah terdiri dari:

a. **Transport ke Kecamatan Penugasan.**

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk transportasi dari dan menuju ke kecamatan lingkup Kabupaten Halmahera Tengah tempat pelaksanaan kegiatan.

b. **Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan.**

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya transportasi ketika telah berada di wilayah kecamatan tujuan dimana kegiatan dilaksanakan

c. **Transport Kegiatan s.d 8 jam.**

Merupakan satuan biaya untuk pengganti biaya transportasi dari dan tempat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di satu wilayah kecamatan tertentu, dan waktu pelaksanaannya sampai dengan 8 jam, dan/atau tidak melebihi 8 jam.

2. **Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai/pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, dan uang saku dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

3. **Uang Representasi.**

Uang representasi merupakan uang yang diberikan kepada Pejabat Negara (untuk tingkatan Kabupaten hanya diberikan Bupati dan Wakil Bupati) dan Pejabat Esselon II dan Anggota DPRD untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah

4. **Biaya Penunjang Perjalanan Dinas.**

Biaya Penunjang Perjalanan Dinas merupakan satuan biaya yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk pelaksanaan kunjungan kerja dan reses. Kunjungan kerja dilakukan per tim sedangkan reses dilakukan per anggota DPRD sesuai Daerah Pemilihan masing-masing.



BUPATI HALMAHERA TENGAH

M. AL YASIN ALI

PENJELASAN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENETAPAN STANDAR BIAYA LAINNYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A. BIAYA PENGINAPAN/HOTEL

Satuan biaya penginapan/hotel merupakan biaya yang dialokasikan untuk pembayaran hotel/penginapan ditempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan yang mekanisme pertanggungjawabannya secara *at cost*. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan.

B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai/pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, uang transport lokal dan uang saku dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Untuk PNS/pejabat yang diberi tugas mengikuti kegiatan/diklat/bimtek/sejenisnya yang memerlukan setoran/distribusi diberikan uang harian sesuai dengan tarif khusus yang telah ditetapkan.

C. SATUAN BIAYA TRANSPORT LUAR DAERAH

C.1 Satuan Biaya Tiket Pesawat

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (pp) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar daerah menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

C.2 Biaya Taksi Perjalanan Luar Daerah

Satuan biaya taksi perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa taksi dalam satu kali perjalanan dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan sebaliknya. Contoh perhitungan alokasi biaya taksi:

Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Halmahera Tengah ke Jakarta.

1. Berangkat

- a) Biaya taksi dari pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong atau dari penginapan/hotel di Ternate ke Bandara Babullah
- b) Biaya taksi dari Bandara Soekarno – Hatta Jakarta ke Hotel tempat menginap di Jakarta

2. Kembali

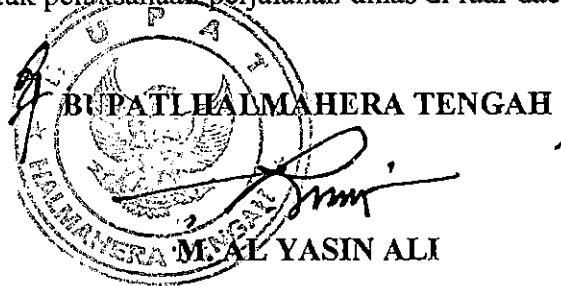
- a) Biaya taksi dari Hotel tempat menginap di Jakarta ke Bandara Soekarno – Hatta Jakarta
- b) Biaya taksi dari Bandara Babullah ke pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong

C.3 Transport Lokal Perjalanan Luar Daerah (Wilayah Maluku Utara)

Satuan Biaya Transport Lokal perjalanan dinas diluar daerah khusus wilayah Maluku Utara merupakan satuan biaya transport dari tempat kedudukan di **Wilayah Halmahera Tengah** menuju ke pelabuhan/terminal/bandara di kabupaten/kota tempat tujuan lingkup Provinsi Maluku Utara dan sebaliknya. Komponen biaya ini **belum termasuk** sewa taksi dari dan ke bandara/terminal/pelabuhan di Kabupaten/Kota tempat tujuan

D. Uang Representasi.

Uang representasi merupakan uang yang diberikan kepada Pejabat Negara (untuk tingkatan Kabupaten hanya diberikan Bupati dan Wakil Bupati) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan untuk pelaksanaan perjalanan dinas di luar daerah.



PENJELASAN

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENETAPAN STANDAR BIAYA LAINNYA PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2017

BIAYA LAIN-LAIN

1. **Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan** diberikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. **Honorarium Pengadaan Barang/Jasa**
 - a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada personil yang diangkat oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Bupati menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa atau Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. **Honorarium Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP)**, diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberi tugas sebagai perangkat pada Unit Layanan Pengadaan. Yang dimaksud dengan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tersebut di atas adalah unit yang struktur organisasinya dilekatkan pada unit organisasi yang sudah ada.
4. **Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan**, diberikan kepada panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per bulan, sedangkan honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan diberikan per paket pekerjaan.
5. **Honorarium Pengelola Sistem Informasi Keuangan Daerah**, diberikan kepada Pegawai yang diberi tugas melakukan pengumpulan data pengolahan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan sesuai dengan unit kerja masing-masing, yang dikelola secara terkomputerisasi yakni Sistem Informasi Keuangan Daerah (Simda Keuangan) dan Sistem Informasi Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).
6. **Honorarium narasumber/pemateri/pembahas/moderator/pembawa acara/pembaca doa dan rohaniwan.**
 - a. Honorarium Narasumber/pembahas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau Non Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/pengetahuan kepada peserta dalam kegiatan seminar/rapat/koordinasi/sosialisasi/desiminasi/bimbingan teknis/work

- shop/rapat kerja/sarasehan/symposium/lokakarya/focus group discussion/kegiatan sejenis
- b. Honorarium moderator diberikan kepada petugas/pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil yang memandu acara/kegiatan yang dilaksanakan.
 - c. Honorarium pembaca doa diberikan kepada petugas/pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri sipil yang memimpin doa bersama saat acara/kegiatan yang dilaksanakan
 - d. Honorarium Rohaniwan diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport bagi rohaniwan
- 7. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan** diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Ketentuan pembentukan tim adalah sebagai berikut: (a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur; (b) bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan Satuan Kerja dan/atau unit kerja lainnya dan masyarakat; (c) bersifat temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan; (d) merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat negara/ pegawai negeri di samping tugas pokoknya sehari-hari; (e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 8. Honorarium Pengajar Diklat**, diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri yang memberikan informasi/pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- a. Pengajar dari luar lingkup Pemda Halmahera Tengah
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dapat mendatangkan pengajar dari luar Halmahera Tengah sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi di lingkup Halmahera Tengah;
 - b. Pengajar dari lingkup Pemda Halmahera Tengah
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
- 9. Satuan Biaya Uang Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Biaya Makan Kegiatan, dan Uang Saku Peserta Kegiatan.**
- a. Uang makan harian dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai jumlah hari kerja.
 - b. Biaya makan kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk konsumsi (makan dan minum) pada saat kegiatan sesuai jumlah peserta, jumlah hari pelaksanaan kegiatan dan jumlah penyajian makanan/minum.
 - c. Uang saku peserta kegiatan adalah merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar kantor sebagai pengganti atas pelaksanaan sebagian kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor. Uang saku kegiatan dapat dibayarkan sepanjang kegiatan memenuhi ketentuan yakni dihadiri oleh peserta dari Satuan Kerja Lainnya/Masyarakat/peserta lainnya selain PNS dan masyarakat, dan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

10. **Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur,**
- Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai PNS/ASN yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang
 - Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya dua jam, secara berturut-turut dan diberikan maksimal satu kali perhari.
11. **Honorarium Satuan Pengamanan, pengemudi dan petugas kebersihan** diberikan kepada non pegawai negeri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satuan pengamanan, pengemudi, petugas kebersihan dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.
12. **Satuan Biaya sewa gedung** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 100 (seratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.
13. **Satuan biaya diklat pimpinan/struktural** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
14. **Satuan biaya latihan prajabatan** merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.
15. **Honorarium Bendaharawan** merupakan honorarium yang diberikan kepada di lingkungan SKPD, SKPK dalam lingkup Kabupaten Halmahera Tengah yang melaksanakan tugas rutin selaku Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Kuasa BUD, Penyimpan Umum Barang, Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah dan/atau PA/KPA.
16. **Tambahan Penghasilan** merupakan biaya yang dibayarkan yang merupakan komponen tambahan penghasilan pejabat dan/atau pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai beban tugas masing-masing dengan maksud meningkatkan kinerja dan tanggungjawab terhadap tugas dan fungsi masing-masing.
- Tambahan Penghasilan Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, dan Staf Ahli, merupakan biaya yang dibayarkan yang merupakan komponen tambahan penghasilan pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah sesuai beban tugas dan tanggungjawabnya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, dan Staf Ahli.

- b. Tambahan Penghasilan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, merupakan biaya yang dibayarkan yang merupakan komponen tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang diberikan tugas selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Tambahan Penghasilan Pengelola/Penatausahaan Keuangan, merupakan biaya yang dibayarkan yang merupakan komponen tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil pengelola keuangan daerah (lingkup SKPKD), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan SKPD.
- d. Honorarium Pegawai Tidak Tetap adalah Honorarium diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Pemerintah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- e. Lain-lain Pendukung Operasional Daerah merupakan satuan biaya yang digunakan sebagai tambahan penghasilan berdasarkan karakteristik tugasnya guna meningkatkan tanggungjawab yang diembannya, diberikan kepada Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekda, Sekreretaris Pribadi Bupati, Sekreretaris Pribadi Wakil Bupati, Sekreretaris Pribadi Sekda, Sekreretaris Asisten dan Staf Ahli, Sekreretaris Pribadi Pimpinan DPRD, Sopir Bupati, Sopir Wakil Bupati, Sopir Sekda, Sopir Rumah Tangga Bupati, Sopir Rumah Tangga Wakil Bupati, Sopir Rumah Tangga Sekda, Ajudan Pimpinan DPRD, Sopir Pimpinan DPRD, dan Insentif Satuan Polisi Pamong Praja.


BUPATI HALMAHERA TENGAH
M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN I

Peraturan Bupati Halmahera Tengah

Nomor : 10 Tahun 2017

Tanggal : 3 April 2017

Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DALAM DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA**

(Dalam rupiah)

BUPATI DAN WAKIL BUPATI								
NO.	KECAMATAN ASAL KE KECAMATAN TUJUAN PENUGASAN ATAU SEBALIKNYA	BIAYA TRANSPORT LOKAL			UANG HARIAN		UANG REPRESENTASE	
		KE KECAMATAN PENUGASAN	LOKAL DI KECAMATAN TUJUAN PENUGASAN	KEGIATAN S/D 8 JAM	BUPATI	WAKIL BUPATI	BUPATI	WAKIL BUPATI
		(OK)	(OK)	(OK)	(OH)	(OH)	(OP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	WEDA		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - WEDA SELATAN	1.500.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - WEDA TENGAH	1.750.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - WEDA UTARA	2.000.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - WEDA TIMUR	2.500.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - PATANI	3.200.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - PATANI BARAT	3.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - PATANI UTARA	3.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - PATANI TIMUR	4.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA - GEBE	5.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
2	WEDA SELATAN		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA SELATAN - WEDA TENGAH	2.000.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA SELATAN - WEDA UTARA	2.250.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA SELATAN - WEDA TIMUR	2.750.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI	3.450.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI BARAT	3.250.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI UTARA	3.750.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI TIMUR	4.250.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA SELATAN - GEBE	5.250.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
3	WEDA TENGAH		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TENGAH - WEDA UTARA	1.000.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TENGAH - WEDA TIMUR	1.500.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TENGAH - PATANI	2.500.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TENGAH - PATANI BARAT	2.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TENGAH - PATANI UTARA	2.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TENGAH - PATANI TIMUR	3.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000


BUPATI DAN WAKIL BUPATI								
NO.	KECAMATAN ASAL KE KECAMATAN TUJUAN PENUGASAN ATAU SEBALIKNYA	BIAYA TRANSPORT LOKAL			UANG HARIAN		UANG REPRESENTASE	
		KE KECAMATAN PENUGASAN	LOKAL DI KECAMATAN TUJUAN PENUGASAN	KEGIATAN S/D 8 JAM	BUPATI	WAKIL BUPATI	BUPATI	WAKIL BUPATI
		(OK)	(OK)	(OK)	(OH)	(OH)	(OP)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	WEDA UTARA		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA UTARA - WEDA TIMUR	750.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA UTARA - PATANI	2.000.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA UTARA - PATANI BARAT	1.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA UTARA - PATANI UTARA	2.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA UTARA - PATANI TIMUR	2.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA UTARA - GEBE	6.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
5	WEDA TIMUR		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TIMUR - PATANI	2.500.000	1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TIMUR - PATANI BARAT	2.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TIMUR - PATANI UTARA	2.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TIMUR - PATANI TIMUR	3.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	WEDA TIMUR - GEBE	6.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
6	PATANI		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI - PATANI BARAT	1.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI - PATANI UTARA	1.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI - PATANI TIMUR	1.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI - GEBE	3.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
7	PATANI BARAT		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI BARAT - PATANI UTARA	1.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI BARAT - PATANI TIMUR	2.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI BARAT - GEBE	3.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
8	PATANI UTARA		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI UTARA - PATANI TIMUR	2.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI UTARA - P. GEBE	4.000.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
9	PATANI TIMUR		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
	PATANI TIMUR - P. GEBE	4.500.000	1.500.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000
10	GEBE		1.000.000	500.000	7.500.000	5.000.000	7.500.000	5.000.000

KET:

OK = Orang per Kegiatan

OH = Orang per Hari

OP = Orang per Perjalanan


 BUPATI HALMAHERA TENGAH,
 M. AL YASIN ALI

(Dalam rupiah)

PEGAUW/NEGARI SIPIL ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI TIDAK TETAP											
NO.	KECAMATAN ASAL KE KECAMATAN PENUGASAN ATAU SEBALIKNYA	BIAYA TRANSPORT			UANG HARIAN				UANG REPRESENTASE	BIAYA PENUNJANG KUNJUNGAN KERJA DAN RESES DPRD	
		KE KECAMATAN PENUGASAN	LOKAL DI KECAMATAN TUJUAN PENUGASAN	KEGIATAN SID 8 JAM	PEGAUW/PE JABAT ESSELON/III DPRD	PEGAUW/PEJ ABAT ESS III/GOL IV	PEGAUW/PEJAB AT ESS IV/GOL III	PEGAUW/ GOL I/II/TIDAK TETAP		KUNJUNGAN KERJA	RESES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	WEDA		500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - WEDA SELATAN	1,500,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - WEDA TENGAH	1,750,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - WEDA UTARA	2,000,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - WEDA TIMUR	2,500,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - PATANI	3,200,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - PATANI BARAT	3,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - PATANI UTARA	3,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - PATANI TIMUR	4,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA - GEBE	5,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
B	WEDA SELATAN		500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA SELATAN - WEDA TENGAH	2,000,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA SELATAN - WEDA UTARA	2,250,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA SELATAN - WEDA TIMUR	2,750,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA SELATAN - PATANI	3,450,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA SELATAN - PATANI BARAT	3,250,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA SELATAN - PATANI UTARA	3,750,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA SELATAN - PATANI TIMUR	4,250,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA SELATAN - GEBE	5,250,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
C	WEDA TENGAH		500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TENGAH - WEDA UTARA	1,000,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TENGAH - WEDA TIMUR	1,500,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TENGAH - PATANI	2,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TENGAH - PATANI BARAT	2,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TENGAH - PATANI UTARA	2,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TENGAH - PATANI TIMUR	3,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TENGAH - GEBE	5,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
D	WEDA UTARA		500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA UTARA - WEDA TIMUR	750,000	500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA UTARA - PATANI	2,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA UTARA - PATANI BARAT	1,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA UTARA - PATANI UTARA	2,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA UTARA - PATANI TIMUR	2,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA UTARA - GEBE	6,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000

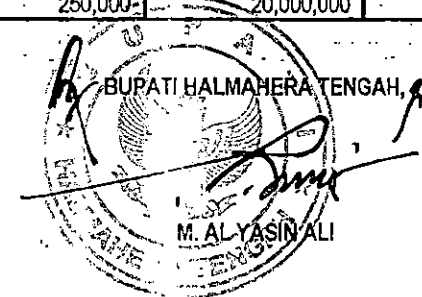
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO.	KECAMATAN ASAL KE KECAMATAN PENUGASAN ATAU SEBALIKNYA	BIAYA TRANSPORT			UANG HARIAN				UANG REPRESENTASE	BIAYA PENUNJANG KUNJUNGAN KERJA DAN RESES DPRD	
		KE KECAMATAN PENUGASAN	LOKAL DI KECAMATAN TUJUAN PENUGASAN	KEGIATAN S/D 8 JAM	PEGAWAI/PE JABAT ESSELON/III/ DPRD	PEGAWAI/PEJ ABAT ESS III/GOL IV	PEGAWAI/PEJAB AT ESS IV/GOL III	PEGAWAI GOL III/TIDAK TETAP		KUNJUNGAN KERJA	RESES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E	WEDA TIMUR		500,000	200,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TIMUR - PATANI	2,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TIMUR - PATANI BARAT	2,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TIMUR - PATANI UTARA	2,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TIMUR - PATANI TIMUR	3,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	WEDA TIMUR - GEBE	6,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
F	PATANI		600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI - PATANI BARAT	1,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI - PATANI UTARA	1,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI - PATANI TIMUR	1,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI - GEBE	3,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
G	PATANI BARAT		600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI BARAT - PATANI UTARA	1,500,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI BARAT - PATANI TIMUR	2,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI BARAT - GEBE	4,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
H	PATANI UTARA		600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI UTARA - PATANI TIMUR	2,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI UTARA - P. GEBE	4,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
J	PATANI TIMUR		600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
	PATANI TIMUR - GEBE	4,000,000	600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000
K	GEBE		600,000	300,000	600,000	550,000	500,000	450,000	250,000	20,000,000	20,000,000

KET: -

OK = Orang per Kegiatan

OH = Orang per Hari



LAMPIRAN II

Peraturan Bupati Halmahera Tengah

Nomor : 10 Tahun 2017

Tanggal : 3 April 2017

Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH**A. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH UNTUK PEJABAT NEGARA**

BUPATI DAN WAKIL BUPATI											
No.	PROVINSI TUJUAN	HOTEL		UANG HARIAN		TRANSPORT				UANG REPRESENTASE	
		100%	30%	Bupati	Wakil Bupati	Tiket Pesawat	Taksi	Transport Lokal Malut	Transport Dalam Kota	BUPATI	WAKIL BUPATI
		OH		OH	OH	OK	OK	OK	OK	OK	OK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	4,420,000	1,326,000	7,500,000	5,000,000	15,500,000	123,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
2	SUMATERA UTARA	4,960,000	1,488,000	7,500,000	5,000,000	14,500,000	232,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
3	RIAU	3,817,000	1,145,100	7,500,000	5,000,000	14,500,000	70,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
4	KEPULAUAN RIAU	4,275,000	1,282,500	7,500,000	5,000,000	14,500,000	105,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
5	JAMBI	4,000,000	1,200,000	7,500,000	5,000,000	14,500,000	128,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
6	SUMATERA BARAT	4,240,000	1,272,000	7,500,000	5,000,000	14,500,000	192,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
7	SUMATERA SELATAN	4,680,000	1,404,000	7,500,000	5,000,000	14,500,000	124,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
8	LAMPUNG	3,960,000	1,188,000	7,500,000	5,000,000	14,500,000	148,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
9	BENGKULU	1,300,000	390,000	7,500,000	5,000,000	14,500,000	92,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
10	BANGKA BELITUNG	3,335,000	1,000,500	7,500,000	5,000,000	14,500,000	86,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
11	BANTEN	3,808,000	1,142,400	7,500,000	5,000,000	14,500,000	320,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
12	JAWA BARAT	3,664,000	1,099,200	7,500,000	5,000,000	14,500,000	118,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
13	DKI. JAKARTA	8,720,000	2,616,000	7,500,000	5,000,000	10,000,000	170,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
14	JAWA TENGAH	4,146,000	1,243,800	7,500,000	5,000,000	14,500,000	50,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
15	YOGYAKARTA	4,620,000	1,386,000	7,500,000	5,000,000	14,500,000	141,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
16	JAWA TIMUR	4,400,000	1,320,000	7,500,000	5,000,000	14,000,000	148,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
17	BALI	4,881,000	1,464,300	7,500,000	5,000,000	14,000,000	160,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
18	NTB	3,429,000	1,028,700	7,500,000	5,000,000	14,000,000	218,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
19	NTT	3,000,000	900,000	7,500,000	5,000,000	14,000,000	81,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
20	KALIMANTAN BARAT	2,400,000	720,000	7,500,000	5,000,000	14,000,000	145,000	No. 32.c kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000

BUPATI DAN WAKIL BUPATI

No.	PROVINSI TUJUAN	HOTEL		UANG HARIAN		TRANSPORT				UANG REPRESENTASE	
		100%	30%	Bupati	Wakil Bupati	Tiket Pesawat	Taksi	Transport Lokal Malut	Transport Dalam Kota	BUPATI	WAKIL BUPATI
		OH	OH	OH	OH	OK	OK	OK	OK	OK	OK
21	KALIMANTAN TENGAH	3,000,000	900,000	7,500,000	5,000,000	14,000,000	94,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
22	KALIMANTAN SELATAN	4,250,000	1,275,000	7,500,000	5,000,000	14,000,000	141,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
23	KALIMANTAN TIMUR	4,000,000	1,200,000	7,500,000	5,000,000	14,000,000	401,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
24	KALIMANTAN UTARA	4,000,000	1,200,000	7,500,000	5,000,000	14,000,000	353,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
25	SULAWESI UTARA	3,200,000	960,000	7,500,000	5,000,000	9,000,000	310,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
26	GORONTALO	1,320,000	396,000	7,500,000	5,000,000	9,500,000	134,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
27	SULAWESI BARAT	1,260,000	378,000	7,500,000	5,000,000	10,500,000	217,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
28	SULAWESI SELATAN	4,820,000	1,446,000	7,500,000	5,000,000	10,500,000	128,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
29	SULAWESI TENGAH	2,030,000	609,000	7,500,000	5,000,000	10,500,000	151,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
30	SULAWESI TENGGARA	1,850,000	555,000	7,500,000	5,000,000	10,500,000	332,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
31	MALUKU	3,000,000	900,000	7,500,000	5,000,000	10,500,000	340,000	No. 32.a kolom 9 dan 10	1,000,000	10,000,000	7,500,000
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. SOFIFI	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	1,500,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	b. KOTA TIDORE KEPULAUAN	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	2,000,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	c. KOTA TERNATE	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	3,000,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	d. KABUPATEN HALMAHERA BARAT	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	3,000,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	e. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	3,500,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	f. KABUPATEN HALMAHERA UTARA	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	3,000,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	g. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	4,500,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	h. KABUPATEN PULAU MOROTAI	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	5,000,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	i. KABUPATEN KEPULAUAN SULA	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	6,500,000	500,000	10,000,000	7,500,000
	j. KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	1,555,000	466,500	7,500,000	5,000,000	-	-	7,000,000	500,000	10,000,000	7,500,000
33	PAPUA	2,850,000	855,000	7,500,000	5,000,000	8,000,000	354,000	No. 32.a kolom 8 dan 9	1,000,000	10,000,000	7,500,000
34	PAPUA BARAT	2,750,000	825,000	7,500,000	5,000,000	14,500,000	130,000	No. 32.a kolom 8 dan 9	1,000,000	10,000,000	7,500,000

Keterangan

OH = Orang/Hari

OK = Orang/Kali

BUPATI HALMAHERA TENGAH,
M. AL YASIN ALI

B. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR UNTUK PEGAWAI NE 3ERI SIPIL, ANGGOTA DPRD TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

B.1. UANG TRANSPORT DAN UANG REPESENTASE


PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI TIDAK TETAP					
No.	PROVINSI TUJUAN	UANG TRANSPORTASI			UANG REPRESENTASE (KHUSUS PJ. ESS II DAN DPRD)
		Tiket Pesawat	Taksi	Transport Lokal Malut	
		OK	OK	OK	OH
1	2	3	4	5	6
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	9,000,000	223,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
2	SUMATERA UTARA	8,000,000	232,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
3	RIAU	8,000,000	170,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
4	KEPULAUAN RIAU	8,000,000	205,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
5	JAMBI	8,000,000	228,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
6	SUMATERA BARAT	8,000,000	192,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
7	SUMATERA SELATAN	8,000,000	224,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
8	LAMPUNG	8,000,000	248,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
9	BENGKULU	8,000,000	192,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
10	BANGKA BELITUNG	8,000,000	186,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
11	BANTEN	7,500,000	320,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
12	JAWA BARAT	7,500,000	218,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
13	DKI. JAKARTA	6,500,000	300,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
14	JAWA TENGAH	7,000,000	150,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
15	YOGYAKARTA	7,500,000	241,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
16	JAWA TIMUR	7,500,000	248,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
17	BALI	7,500,000	260,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
18	NTB	7,500,000	218,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
19	NTT	7,500,000	181,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
20	KALIMANTAN BARAT	7,500,000	245,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
21	KALIMANTAN TENGAH	7,500,000	194,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
22	KALIMANTAN SELATAN	7,500,000		No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
23	KALIMANTAN TIMUR	7,500,000	401,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
24	KALIMANTAN UTARA	7,500,000	353,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
25	SULAWESI UTARA	3,500,000	310,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
26	GORONTALO	4,000,000	134,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
27	SULAWESI BARAT	5,000,000	217,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
28	SULAWESI SELATAN	5,000,000	128,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
29	SULAWESI TENGAH	5,000,000	151,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
30	SULAWESI TENGGARA	5,000,000	332,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
31	MALUKU	6,500,000	340,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
32	MALUKU UTARA				
	a. SOFIFI		350,000	1,500,000	250,000
	b. KOTA TIDORE KEPULAUAN		350,000	2,000,000	250,000
	c. KOTA TERNATE		250,000	3,000,000	250,000
	d. KABUPATEN HALMAHERA BARAT		375,000	3,000,000	250,000
	e. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR		400,000	3,500,000	250,000
	f. KABUPATEN HALMAHERA UTARA		400,000	3,000,000	250,000
	g. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN		400,000	4,500,000	250,000
	h. KABUPATEN PULAU MOROTAI		400,000	5,000,000	250,000
	i. KABUPATEN KEPULAUAN SULA		500,000	6,500,000	250,000
	j. KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU		600,000	7,000,000	250,000
33	PAPUA	4,000,000	354,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000
34	PAPUA BARAT	8,000,000	130,000	No. 32.c kolom 4 dan 5	250,000

Keterangan
OH = Orang/Hari
OK = Orang/Kali

BUPATI HALMAHERA TENGAH,
AL YASIN ALI

B.2. HOTEL/PENGINAPAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI TIDAK TETAP									
No.	PROVINSI TUJUAN	HOTEL/PENGINAPAN							
		PEGAWAI/PEJABAT ESSELON III/DPRD		PEGAWAI/PEJABAT ESS III/GOL IV		PEGAWAI/PEJABAT ESS IV/GOL III		PEGAWAI GOL III	
		100%	30%	100%	30%	100%	30%	100%	30%
		ORANG/HARI							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	1,308,000	392,400	1,080,000	324,000	410,000	123,000	370,000	111,000
2	SUMATERA UTARA	1,214,000	364,200	703,000	210,900	505,000	151,500	310,000	93,000
3	RIAU	1,168,000	350,400	868,000	260,400	450,000	135,000	380,000	114,000
4	KEPULAUAN RIAU	1,285,000	385,500	650,000	195,000	502,000	150,600	280,000	84,000
5	JAMBI	1,176,000	352,800	697,000	209,100	382,000	114,600	290,000	87,000
6	SUMATERA BARAT	1,155,000	346,500	884,000	265,200	477,000	143,100	370,000	111,000
7	SUMATERA SELATAN	1,228,000	368,400	605,000	181,500	514,000	154,200	310,000	93,000
8	LAMPUNG	1,299,000	389,700	790,000	237,000	374,000	112,200	356,000	106,800
9	BENGKULU	790,000	237,000	712,000	213,600	599,000	179,700	510,000	153,000
10	BANGKA BELITUNG	1,310,000	393,000	850,000	255,000	533,000	159,900	304,000	91,200
11	BANTEN	1,430,000	429,000	1,024,000	307,200	797,000	239,100	400,000	120,000
12	JAWA BARAT	1,753,000	525,900	949,000	284,700	515,000	154,500	463,000	138,900
13	DKI. JAKARTA	1,086,000	325,800	800,000	240,000	610,000	183,000	400,000	120,000
14	JAWA TENGAH	1,478,000	443,400	1,024,000	307,200	497,000	149,100	350,000	105,000
15	YOGYAKARTA	1,334,000	400,200	747,000	224,100	628,000	188,400	461,000	138,300
16	JAWA TIMUR	1,359,000	407,700	841,000	252,300	499,000	149,700	329,000	98,700
17	BALI	1,810,000	543,000	1,304,000	391,200	904,000	271,200	658,000	197,400
18	NTB	2,738,000	821,400	737,000	221,100	540,000	162,000	360,000	108,000
19	NTT	1,000,000	300,000	700,000	210,000	662,000	198,600	400,000	120,000
20	KALIMANTAN BARAT	1,130,000	339,000	866,000	259,800	430,000	129,000	361,000	108,300
21	KALIMANTAN TENGAH	1,596,000	478,800	923,000	276,900	558,000	167,400	436,000	130,800
22	KALIMANTAN SELATAN	1,679,000	503,700	816,000	244,800	500,000	150,000	379,000	113,700
23	KALIMANTAN TIMUR	3,021,000	906,300	1,596,000	478,800	550,000	165,000	450,000	135,000
24	KALIMANTAN UTARA	3,021,000	906,300	1,596,000	478,800	550,000	165,000	450,000	135,000
25	SULAWESI UTARA	1,553,000	465,900	640,000	192,000	549,000	164,700	342,000	102,600
26	GORONTALO	1,134,000	340,200	910,000	273,000	423,000	126,900	240,000	72,000
27	SULAWESI BARAT	1,030,000	309,000	910,000	273,000	425,000	127,500	360,000	108,000
28	SULAWESI SELATAN	1,912,000	573,600	968,000	290,400	539,000	161,700	378,000	113,400
29	SULAWESI TENGAH	1,298,000	389,400	894,000	268,200	493,000	147,900	389,000	116,700
30	SULAWESI TENGGARA	1,070,000	321,000	802,000	240,600	488,000	146,400	420,000	126,000
31	MALUKU	1,030,000	309,000	680,000	204,000	545,000	163,500	414,000	124,200
32	MALUKU UTARA	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. SOFIFI	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	b. KOTA TIDORE KEPULAUAN	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	c. KOTA TERNATE	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	d. KABUPATEN HALMAHERA BARAT	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	e. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	f. KABUPATEN HALMAHERA UTARA	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	g. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	h. KABUPATEN PULAU MOROTAI	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	i. KABUPATEN KEPULAUAN SULA	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
	j. KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	756,000	226,800	450,000	135,000	358,500	107,550	285,000	85,500
33	PAPUA	1,668,000	500,400	754,000	226,200	460,000	138,000	414,000	124,200
34	PAPUA BARAT	1,482,000	444,600	976,000	292,800	758,000	239,400	370,000	111,000



 BUPATI HALMAHERA TENGAH,

 M. AL YASIN ALI

B. 3 UANG HARIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA DPRD DAN PEGAWAI TIDAK TETAP									
No.	PROVINSI TUJUAN	UANG HARIAN							
		PEGAWAI/PEJABAT ESSELON III/DPRD		PEGAWAI/PEJABAT ESS III/GOL IV		PEGAWAI/PEJABAT ESS IV/GOL III		PEGAWAI GOL III/TIDAK TETAP	
		Biasa	Kegiatan Berkontribusi	Biasa	Kegiatan Berkontribusi	Biasa	Kegiatan Berkontribusi	Biasa	Kegiatan Berkontribusi
		ORA NG/HARI (OH)							
1	2	11	12	3	4	5	6	7	8
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
2	SUMATERA UTARA	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
3	RIAU	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
4	KEPULAUAN RIAU	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
5	JAMBI	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
6	SUMATERA BARAT	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
7	SUMATERA SELATAN	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
8	LAMPUNG	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
9	BENGKULU	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
10	BANGKA BELITUNG	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
11	BANTEN	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
12	JAWA BARAT	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
13	DKI. JAKARTA	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
14	JAWA TENGAH	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
15	YOGYAKARTA	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
16	JAWA TIMUR	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
17	BALI	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
18	NTB	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
19	NTT	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
20	KALIMANTAN BARAT	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
21	KALIMANTAN TENGAH	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
22	KALIMANTAN SELATAN	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
23	KALIMANTAN TIMUR	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
24	KALIMANTAN UTARA	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
25	SULAWESI UTARA	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
26	GORONTALO	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
27	SULAWESI BARAT	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
28	SULAWESI SELATAN	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
29	SULAWESI TENGAH	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
30	SULAWESI TENGGARA	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
31	MALUKU	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
32	MALUKU UTARA								
	a. SOFIFI	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	b. KOTA TIDORE KEPULAUAN	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	c. KOTA TERNATE	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	d. KABUPATEN HALMAHERA BARAT	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	e. KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	f. KABUPATEN HALMAHERA UTARA	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	g. KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	h. KABUPATEN PULAU MOROTAI	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	i. KABUPATEN KEPULAUAN SULA	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
	j. KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	600,000	180,000	550,000	165,000	500,000	150,000	450,000	135,000
33	PAPUA	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000
34	PAPUA BARAT	800,000	240,000	700,000	210,000	650,000	195,000	550,000	165,000

BUPATI HALMAHERA TENGAH,
M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN III

Peraturan Bupati Halmahera Tengah

Nomor : 10 Tahun 2017

Tanggal : 3 April 2017

Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

STANDAR SATUAN BIAYA LAIN-LAIN

(Dalam rupiah)

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN		
	1.1 Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	
	a. Nilai pagu dana Rp s.d. Rp50 Juta	OB	300,000
	b. Nilai pagu dana Rp50 juta s.d. Rp100 Juta	OB	500,000
	c. Nilai pagu dana Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	OB	610,000
	d. Nilai pagu dana Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OB	720,000
	e. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OB	830,000
	f. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	970,000
	g. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1,110,000
	h. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1,250,000
	i. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,580,000
	j. Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,910,000
	k. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2,250,000
	l. Nilai pagu dana Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2,580,000
	m. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	3,080,000
	1.2 Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/Bulan	
	a. Nilai pagu dana Rp s.d. Rp50 Juta	OB	270,000
	b. Nilai pagu dana Rp50 juta s.d. Rp100 Juta	OB	450,000
	c. Nilai pagu dana Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	OB	549,000
	d. Nilai pagu dana Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OB	648,000
	e. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OB	747,000
	f. Nilai pagu dana Rp1' miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	873,000
	g. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	999,000
	h. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1,125,000
	i. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,422,000
	j. Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,719,000
	k. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2,025,000
	l. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2,322,000
	m. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2,772,000
	1.3 Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	
	b. Nilai pagu dana Rp50 juta s.d. Rp100 Juta	OB	480,000
	c. Nilai pagu dana Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	OB	590,000
	d. Nilai pagu dana Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OB	700,000
	e. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OB	800,000
	f. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	940,000
	g. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1,070,000
	h. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1,210,000
	i. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,530,000
	j. Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,850,000
	k. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	2,170,000
	l. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2,490,000
	m. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2,980,000

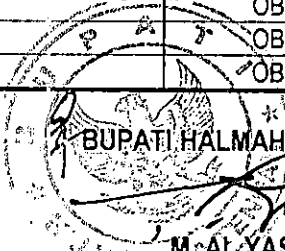
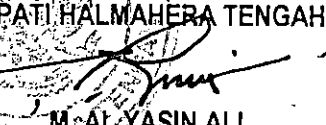
No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	Pengguna Anggaran		
2.1.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Orang/Paket	
	a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OP	250,000
	b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	300,000
	c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	400,000
	d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	500,000
	e. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	600,000
	f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,000,000
	g. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,510,000
	h. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,750,000
	b. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,250,000
	c. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3,580,000
2.1.2	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Orang/Paket	
	a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OP	250,000
	b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	300,000
	c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	400,000
	d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	500,000
	e. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	600,000
	f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,000,000
	g. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,510,000
	h. Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,750,000
	i. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,230,000
	b. Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,560,000
2.1.3	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Orang/Paket	
	a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OP	350,000
	b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	400,000
	c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	500,000
	d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	600,000
	e. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	700,000
	f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,200,000
	g. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,510,000
	h. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,750,000
	i. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,990,000
	j. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,230,000
	k. Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,560,000
2.2	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.2.1	Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	Orang/Paket	
	a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OP	100,000
	b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	187,500
	c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	225,000
	d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	300,000
	e. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	375,000
	f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	450,000
	g. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	750,000
	h. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,132,500
	i. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1,312,500
	j. Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1,687,500
	k. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2,685,000
2.2.2	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	Orang/Paket	
	a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OP	187,500
	b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	225,000
	c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	300,000
	d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	375,000

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	450,000
	f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	750,000
	g. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,132,500
	h. Nilai pagu di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,312,500
	i. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1,672,500
	b. Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1,920,000
	2.2.3 Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)	Orang/Paket	
	a. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OP	280,000
	b. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	320,000
	c. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	400,000
	d. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	480,000
	e. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	560,000
	f. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	960,000
	g. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,510,000
	h. Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,750,000
	i. Nilai pagu di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1,990,000
	j. Nilai pagu di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2,230,000
	2.3 Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680,000
	2.4 Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaa/Jasa (Konstruksi)	Orang Per Paket	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 Juta	OP	680,000
	b. Nilai pagu dana Rp 200 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	850,000
	c. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	1,020,000
	d. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,270,000
	e. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,520,000
	f. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,780,000
	g. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2,120,000
	h. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,450,000
	i. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2,790,000
	j. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3,130,000
	k. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3,580,000
	2.5 Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Jasa (Non Konstruksi)	Orang Per Paket	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 Juta	OP	760,000
	b. Nilai pagu dana Rp 200 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	850,000
	c. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	920,000
	d. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1,140,000
	e. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,370,000
	f. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,600,000
	g. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,910,000
	h. Nilai pagu dana Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2,210,000
	2.6 Panitia Pengadaan Jasa (Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya) dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Jasa (Non Konstruksi)	Orang Per Paket	
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp Rp50 Juta	OP	450,000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 Juta	OP	450,000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp Rp100 Juta	OP	450,000
	d. Nilai pagu di atas Rp100 Juta s.d. Rp250 Juta	OP	480,000
	e. Nilai pagu di atas Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	600,000
	f. Nilai pagu di atas Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	720,000
	g. Nilai pagu di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	910,000
	h. Nilai pagu di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1,090,000

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,270,000
	j. Nilai pagu di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,510,000
	k. Nilai pagu di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,750,000
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN	Orang/Bulan	
	3.1. Kepala ULP	OB	1,000,000
	3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750,000
4	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN		
	4.1 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	420,000
	4.2 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Paket	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp200 Juta	OP	420,000
	b. Nilai pagu dana Rp200 Juta s.d. Rp500 Juta	OP	520,000
	c. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OP	620,000
	d. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	770,000
	e. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	910,000
	f. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1,060,000
	g. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1,260,000
	h. Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1,450,000
	i. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1,650,000
	j. Nilai pagu dana Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	1,840,000
	k. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2,100,000
5	HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA) DAN WEBSITE PEMDA	Orang/Bulan	
	5.1 Pengarah (Kepala SKPD)	OB	2,000,000
	5.2 Penanggung jawab (Sekretaris)	OB	1,850,000
	5.3 Koordinator (Kepala Bidang)	OB	1,650,000
	5.4 Ketua (Admin)	OB	1,500,000
	5.5 Anggota/petugas/pengguna SIMDA	OB	750,000
6	HONORARIUM NARASUMBER/PEMATERI/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA PEMBACA DOA DAN ROHANIWAN		
	6.1 Honorarium Narasumber/Pemateri/Pembahas/Analisis Perundang-Undangan		
	a. Dari pusat/Kementerian/Badan/Lembaga/Perguruan Tinggi, Pakar, Profesional	Orang/Jam	1,700,000
	b. Dari Provinsi	Orang/Jam	1,400,000
	c. Dari Lokal/Bupati/Wakil Bupati/Ketua, Wakil Ketua, Anggota DPRD	Orang/Jam	1,200,000
	d. Dari Pejabat Eselon II/Disetarakan	Orang/Jam	900,000
	e. Dari Pejabat Eselon III ke bawah/Disetarakan	Orang/Jam	700,000
	6.2 Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	500,000
	6.3 Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	350,000
	6.4 Honorarium Pembawa/Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	300,000
	7.5 Honorarium Rohaniwan	Orang/Kegiatan	400,000
7	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	7.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Pengarah	Orang/Kegiatan	1,500,000
	b. Penanggungjawab	Orang/Kegiatan	1,250,000
	c. Koordinator/Ketua	Orang/Kegiatan	1,000,000
	d. Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	850,000
	e. Sekretaris	Orang/Kegiatan	750,000
	f. Anggota	Orang/Kegiatan	750,000
	7.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	c. Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	500,000
	b. Anggota	Orang/Kegiatan	450,000

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
8	HONORARIUM PENGAJAR DIKLAT		
	8.1. Pengajar Yang Berasal dari Luar Pemda Halmahera Tengah	Orang/Jam	300,000
	8.2. Pengajar Yang Berasal dari Pemda Halmahera Tengah	Orang/Jam	200,000
9	SATUAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, UANG MAKAN KEGIATAN, UANG SAKU PESERTA KEGIATAN		
	9.1 Uang Makan Harian		
	a. Golonga I dan II	Orang/Hari	35,000
	b. Golonga III	Orang/Hari	37,000
	c. Golonga IV	Orang/Hari	41,000
	9.2 Uang Makan Kegiatan		
	a. Prasmanan	Orang/Kali	50,000
	b. Rantangan/Kotak	Orang/Kali	40,000
	c. Snack	Orang/Kali	25,500
	9.3 Uang Saku Peserta Kegiatan	Orang/Hari	75,000
10	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR		
	10.1 Uang Lembur		
	a. Golongan I	Orang/Jam	10,000
	b. Golongan II	Orang/Jam	13,000
	c. Golongan III	Orang/Jam	17,000
	d. Golongan IV		20,000
	10.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	35,000
	b. Golongan III	Orang/Hari	37,000
	c. Golongana IV	Orang/Hari	41,000
11	HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI		
	11.1 Satpam dan Pengemudi	Orang/Bulan	1,600,000
	11.2 Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	1,500,000
12	SEWA GEDUNG PERTEMUAN	Per Kegiatan	8,000,000
13	SATUAN BAYA DIKLAT PIMPINAN STRUKTURAL		
	13.1 Diklat Pimpinan Tingkat II	Peserta/Angkatan	30,261,000
	13.2 Diklat Pimpinan Tingkat III	Peserta/Angkatan	22,125,000
	13.3 Diklat Pimpinan Tingkat IV	Peserta/Angkatan	20,230,000
14	SATUAN BAYA LATIHAN PRAJABATAN		
	14.1 Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4,470,000
	14.2 Golongan III	Peserta/Angkatan	5,545,000
15	HONORARIUM BENDAHARAWAN	Orang/Bulan	
	15.1 Bendahara Umum Daerah	OB	2,500,000
	15.2 Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	2,000,000
	15.3 Bendahara Pengeluaran	OB	950,000
	15.4 Bendahara Penerimaan	OB	800,000
	15.5 Bendahara Penerimaan Pembantu	OB	700,000
	15.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu	OB	700,000
	15.7 Pembantu Kuasa BUD	OB	1,200,000
	15.8 Penyimpan Umum Barang (Tingkat Pengelola/(BPKAD)	OB	1,000,000
	15.9 Pengurus Barang (Tingkat Pengguna Barang (SKPD/Dinas/Kantor/ Badan)	OB	800,000
	15.10 Penyimpan Barang (Tingkat Pengguna Barang (SKPD/Dinas/Kantor/ Badan)	OB	650,000
	15.11 Pembantu Pengurus Barang (Tingkat Kuasa Pengguna Barang	OB	400,000

No.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
16	TAMBAHAN PENGHASILAN		
16.1	Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli	Orang/Bulan	
	a. Sekretaris Daerah	OB	25,000,000
	b. Asisten Sekretaris Daerah	OB	10,000,000
	c. Staf Ahli Bupati	OB	10,000,000
16.2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Orang/Bulan	
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 Juta	OB	187,500
	b. Nilai pagu dana Rp50 juta s.d. Rp100 Juta	OB	360,000
	c. Nilai pagu dana Rp 100 Juta s.d. Rp250 Juta	OB	442,500
	d. Nilai pagu dana Rp250 Juta s.d. Rp500 Juta	OB	525,000
	e. Nilai pagu dana Rp500 Juta s.d. Rp1 miliar	OB	600,000
	f. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	705,000
	g. Nilai pagu dana Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	802,500
	h. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	907,500
	i. Nilai pagu dana Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1,147,500
	j. Nilai pagu dana Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1,387,500
	k. Nilai pagu dana Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1,627,500
	l. Nilai pagu dana Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1,867,500
	m. Nilai pagu di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2,235,000
16.3	Pengelola/Penatausahaan Keuangan	Orang/Bulan	
	a. Pengelola Administrasi Keuangan dan Gaji (lingkup SKPKD)	OB	2,000,000
	b. Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) SKPD	OB	1,000,000
	c. Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK) Sekda dan PPK SKPD	OB	1,500,000
	d. Pejabat/Pegawai/Tim Penyusun dan Pengelola Pertanggungjawaban APBD	OB	2,000,000
16.4	Pegawai Tidak Tetap	Orang/Bulan	1,000,000
16.6	Lain-Lain Pendukung Operasional Daerah	Orang/Bulan	
	a. Ajudan Bupati	OB	1,000,000
	b. Ajudan Wakil Bupati	OB	1,000,000
	c. Ajudan Sekda	OB	750,000
	d. Sespri Bupati	OB	750,000
	e. Sespri Wakil Bupati	OB	650,000
	f. Sespri Sekda	OB	650,000
	g. Sespri Asisten dan Staf Ahli	OB	450,000
	h. Sespri Pimpinan DPRD	OB	650,000
	i. Sopir Bupati	OB	750,000
	j. Sopir Wakil Bupati	OB	750,000
	k. Sopir Sekda	OB	750,000
	l. Sopir Rumah Tangga Bupati	OB	750,000
	m. Sopir Rumah Tangga Wakil Bupati	OB	750,000
	n. Sopir Rumah Tangga Sekda	OB	600,000
	o. Ajudan Pimpinan DPRD	OB	750,000
	p. Sopir Pimpinan DPRD	OB	750,000
	q. Insentif Satpol PP	OB	750,000


 BUPATI HALMAHERA TENGAH,

 M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN IV

Peraturan Bupati Halmahera Tengah

Nomor : 10 Tahun 2017

Tanggal : 3 April 2017

Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		Rp.	

Terbilang

Telah dibayar sejumlah

Rp.....

....., tanggal, bulan, tahun

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp.....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)

Nip.

(.....)

Nip.

PERHITUNGAN SPPD RAMP JNG

Ditetapkan sejumlah

Yang telah dibayarkan semula

Sisa kurang/lebih

Rp.....

Rp.....

Rp.....

Pengguna Anggaran SKPD

(.....)
NIP.....
BUPATI HALMAHERA TENGAH
M. AL YASIN ALI

LAMPIRAN V

Peraturan Bupati Halmahera Tengah
Nomor 12 Tahun 2014

Nomor : 10 Tahun 2017

Tanggal : 3 April 2017

Tentang : Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah

Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.

Pegawai Tetap dan Penetapan Biaya Lainnya
Pada Pemerintah K.

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2017

DAFTAR PENGELUARAN RIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

NIP

Jabatan

berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor.....tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan
dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

No.	URAIAN	JUMLAH
	Rp.	
Terbilang		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah/Negara

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kepala SKPD:

....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD

(.....)
Nip.

